

EKA YUDHA WIBOWO, M.A



**Haji dan Siasat Perlawanan
Terhadap Kolonial
di Indonesia
1900-1945**



Pengantar:
Dr. Sujadi, M.A

**Haji dan Siasat Perlawanan
Terhadap Kolonial di Indonesia 1900-1945**

© Eka Yudha Wibowo, M.A

Penyunting:
Marsus, Junaidi

Tata letak isi: Marsus
Desain cover: Herdananto

SULUR PUSTAKA
Jl. Jogja-Solo, Km. 14, Candisari RT.01/22,
Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
e-mail: sulurpustaka@gmail.com
website: www.sulur.co.id
phone: 081935178562

Cetakan 1, 2022
14 x 20 cm. xxviii+110 hlm
ISBN: 978-623-5294-16-2

Berhaji dari Indonesia dan Eropa

Oleh: Dr. Sujadi, M.A¹

Ibadah haji (di Makkah dan sekitarnya) merupakan ibadah fisik yang memerlukan kesiapan finansial dan mental. Di samping harus mengeluarkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan memerlukan kesabaran karena diikuti oleh jutaan orang (dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi masih adanya wabah Covid-19 seperti tahun 2022 ini) dari seluruh dunia, aktifitas ibadah haji lebih mengandalkan kekuatan fisik. Dalam kondisi sehat, ibadah sa'i mengharuskan calon jama'ah haji berjalan cepat atau berlari kecil berkali-kali; ibadah tawaf mengharuskannya mengelilingi ka'bah beberapa kali; dan apalagi wuquf di Arafah (simbol keabsahan ibadah haji) memerlukan ketahanan fisik karena harus berada di Padang Arafah yang sengatan mataharinya sangat terasa walau sekarang sudah disiapkan tenda dan penyejuknya. Juga,

¹ Staf pengajar Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan konsen dengan riset-riset minoritas muslim dan Islam Indonesia.

proses-proses administrasi harus diikuti sebelum meninggalkan negaranya menuju Saudi Arabia. Perlunya kesiapan finansial, paling tidak mulai tahun 2022, berlaku tidak hanya di Indonesia sebagai negara berkembang, namun juga di negara-negara maju (katakanlah di Eropa). Di Eropa, dengan adanya perubahan sistem pendaftaran dan ketidakpastian keberangkatannya walau sudah mendaftar dan memilih paket yang ditawarkan di sistem yang disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia (dari yang paling terjangkau hingga paling mahal). Namun sistem ini tidak menjamin terpenuhinya pilihan kita.

Alhamdulillah, sebelum Covid-19 penulis berksempatan mengunjungi Pulau Rubiah, Sabang, Aceh. Penulis melihat bahwa pulau itu tidak begitu jauh terpisah dari bagian Provinsi Nanggro Aceh Darus Salam (N.A.D.). Pulau Rubiah ini pada masa pemerintah kolonial Belanda digunakan sebagai karantina bagi mereka, pada umumnya dari wilayah Sumatra, yang berhaji baik sebelum berangkat ke Saudi Arabia maupun sesudah pulangnya.² Posisinya yang terpisah dari daratan utama Provinsi N.A.D mendukung untuk tujuan apapun, termasuk pengawasan penguasa kolonial dan isolasi dari berbagai wabah/penyakit menular yang terbawa oleh mereka yang telah melaksanakan ibadah haji.

² Inmas Aceh, "Mengenal Pulau Rubiah, Pusat Karantina Jemaah Haji Masa Kolonial," <http://haji.kemendag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>, diakses 25 Juli 2022.

Mereka yang telah pulang dari berhaji sering dicurigai membawa berbagai wabah penyakit karena kondisi mereka saat pulang dari ibadah haji banyak yang dalam kondisi kurang bagus kesehatannya walau mereka bergembira karena telah dapat menunaikan ibadah haji yang berbulan-bulan lamanya.³ Perlu diketahui bahwa Pulau Rubiah pernah dijadikan tempat penahanan para pejuang Aceh.⁴ Juga pada saat itu, posisinya membuat mereka yang akan melakukan ibadah haji dari Sumatra (bukan dari Jawa yang dikarantina di Pulau Onrust, sekarang dikenal Kepulauan Seribu⁵) harus berjibaku dapat mengatasi perjalanan laut dan darat untuk sampai ke pulau tersebut.⁶ Intinya, mereka yang ingin berhaji harus dikarantina dulu di Pulau Rubiah hingga 1-2 bulan, baik sebelum maupun sesudah melaksanakan ibadah haji.⁷ Ini semua cerita berhaji dari tanah air Indonesia masa kolonial.

Pada masa sekarang, tentunya kondisinya berbeda. Di negara non-muslim dan sekuler pun seperti Belanda, negara

³ R.A.A. Wiranatakusuma, "Seorang Bupati Naik Haji", di Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1950* (Jakarta-Paris: KPG-EFEO, 2013), 652.

⁴ "Kisah Pelabuhan Karantina Haji di Pulau Rubiah Sabang", <https://www.beritatrans.com/artikel/202382/Kisah-Pelabuhan-Karantina-Haji-di-Pulau-Rubiah-Sabang/>. Diakses 7 Juli 2022.

⁵ Inmas Aceh, "Mengenal Pulau Rubiah, Pusat Karantina Jemaah Haji Masa Kolonial", <http://haji.kemenag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>, diakses 25 Juli 2022.

⁶ Masrizal bin Zairi, "Cerita Embarkasi Haji Pertama di Pulau Rubiah, Dibangun Belanda Tahun 1920, Kini Jadi Objek Wisata, Cerita Embarkasi Haji", <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/03/cerita-embarkasi-haji-pertama-di-pulau-rubiah-dibangun-belanda-tahun-1920-kini-jadi-objek-wisata?page=3>, diakses 4 Juli 2022.

⁷ Inmas Aceh, "Mengenal Pulau Rubiah, Pusat Karantina Jama'ah Haji Masa Kolonial", <http://haji.kemenag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>, diakses 6 Juli 2022.

yang penulis pernah tinggal cukup lama, tidak ada larangan untuk muslim yang akan berhaji. Dinyatakan bahwa "*the special character of religion and life philosophy leads the Dutch government to take a neutral position in that matter [pilgrimage to Mecca] and serves to them be free.*"⁸ Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa para calon jama'ah haji dapat berangkat dari Belanda secara bebas selagi tidak berbenturan dengan aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Mereka hanya perlu berkomunikasi dengan pihak travel dan bisa dibantu oleh organisasi tempat mereka terafiliasi sehingga mendapatkan visa haji, tiket pulang pergi ke Saudi Arabia, tempat tinggal, dan keperluan ibadah haji lainnya.

Walaupun demikian, calon jama'ah haji dari Belanda tetap memerlukan kesiapan fisik dan mental. Bagi dia yang terbiasa tinggal di tempat yang sejuk dan tidak panas tentu harus mempersiapkan diri karena dia akan hijrah sementara dari negara dingin ke negara panas. Juga, diperlukan informasi yang cukup untuk mengantisipasi berbagai situasi dalam pelaksanaan ritual-ritual ibadah haji. Tradisi antri yang sudah mapan di Belanda dimungkinkan tidak mudah atau bahkan susah diterapkan dalam pelaksanaan ritual

⁸ Lihat W. A. R. Shadidi and P. S. van Koningsveld, *Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe: Opportunities and Obstacles in the acquisition of Equal Rights (with an Extensive Bibliography)* (Kampen: Kok Pharos, 1995), 8-9.

tersebut karena diikuti oleh jutaan orang.

Bahkan sekarang kedua kesiapan tersebut harus diiringi dengan kesiapan finansial. Ini bukan karena ada pembatasan dari pemerintah non-muslim setempat, tapi lebih karena aturan dan sistem baru yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kondisi ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan pelaksanaan haji sebelum tahun 2022 ini, sebelum ada wabah Covid-19. Dengan sistem yang baru, calon jam'ah haji tahun ini susah untuk mendapatkan kepastian besaran ONH dari Eropa – akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah otoritas pemerintah kolonial Belanda di Indonesia berakhir tahun 1949,⁹ tentu kebijakan-kebijakan penyelenggaraan haji lebih baik. Ini wajar karena perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintahan sendiri pasti membawa dampak perubahan yang lebih baik. Contoh-contohnya adalah proses pendaftaran yang lebih tersistem;¹⁰ *quota* calon haji yang semakin bertambah – karena masih mengantisipasi pe-

⁹ Buya Hamka, "Haji Diulas Ulama Besar", di Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1950* (Jakarta-Paris: KPG-EFEO, 2013), 749-751.

¹⁰ "Haji Pintar (Pendaftaran Haji Reguler)", <https://haji.kemenag.go.id/v4/node/963478>, diakses 27 Juli 2022.

nyebaran wabah Covid-19 tahun 2022 *quota* haji untuk Indonesia sekitar seratus ribuan – separuh dari tahun-tahun sebelumnya, dua ratus ribuan di masa normal;¹¹ kesediaan embarkasi yang semakin dekat dengan tempat tinggal; dan adanya pendampingan yang lebih nyaman dari pemerintah – paling tidak ada pendampingan teknis dan legal-spiritual saat pelaksanaan haji di Makkah dan sekitarnya.¹² Tentu situasinya berbeda bila kita mencermati penyelenggaraan ibadah haji dari Indonesia di masa kolonial.

Paling tidak, ada dua kebijakan besar. Memang betul sebelum abad ke-19, ada kebijakan-kebijakan yang situasional dari penguasa kolonial melalui *Verenigde Oost Indies Compagnie* (VOC) – dari larangan kembali ke Indonesia untuk jama'ah haji yang pulang dari Makkah dan larangan penggunaan kapal-kapal perusahaan (VOC) untuk yang akan berhaji.¹³ Namun pada prinsipnya, ada kebijakan membatasi penyelenggaraan ibadah haji dan kebijakan sebaliknya.¹⁴ Kebijakan pertama muncul dikarenakan kekhawatiran yang kuat dari penguasa kolonial akan munculnya pengaruh ideologi Pan-Islamisme pada jama'ah haji asal Indonesia.

¹¹ M. Rusydi Sani, "Estimasi Keberangkatan Haji Makin Lama, Ini Penjelasan Kemenag", <https://kemenag.go.id/read/estimasi-keberangkatan-haji-makin-lama-ini-penjelasan-kemenag-nvkj4>, diakses 27 Juli 2022.

¹² "PMA RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler", <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/3-191028010933-5db6861d6ae00.pdf>, diakses 27 Juli 2022.

¹³ J. Vredembregt, *The Haddj: Some of Its Features and Functions in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 118, No. 1, 1962, 97-98.

¹⁴ Aqib Sumianto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 9 dan 12.

Satu contoh pembatasan adalah tingginya harga *passport*, seratus sepuluh gulden, bagi yang pergi berhaji.¹⁵ Perlu dijelaskan bahwa Pan-Islamisme adalah Ideologi yang menggerakkan umat Islam seluruh dunia untuk melawan imperalisme – ini otomatis wasilah untuk memiliki pemerintahan atau kekuasaan sendiri.¹⁶ Kekhawatiran ini muncul karena kurangnya pengetahuan penguasa kolonial tentang agama Islam.¹⁷ Ini mengakibatkan ketidakmampuannya membuat kebijakan yang kurang tepat dan meresahkan mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji. Mereka yang melaksanakan ibadah haji merasa tidak nyaman, karena bukan hanya tidak mendapatkan fasilitas yang tidak layak, tapi mereka pergi berhaji juga tanpa bekal finansial dan pengetahuan beribadah haji yang cukup.¹⁸

Sementara itu, kebijakan kedua terbit setelah adanya masukan dari seorang intel. Adalah C. Snouck Hurgronje (intel) yang memberi masukan tersebut kepada pemerintah kolonial Belanda. Dia berpendapat bahwa dalam Islam terdapat ibadah murni, politik Islam, dan hukum Islam.

¹⁵ J. Vredenburg, *The Haddj: Some of Its Features and Functions in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 118, No. 1, 1962, 97-98.

¹⁶ "Pendahuluan", dalam Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam 1482-1890*, Cet. I, (Jakarta-Paris: KPG-EFEO, 2013), 58-59.

¹⁷ J. Vredenburg, *The Haddj: Some of Its Features and Functions in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 118, No. 1, 1962, 97-98.

¹⁸ R.A.A. Wiranatakusuma, "Seorang Bupati Naik Haji", di Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1950* (Jakarta-Paris: KPG-EFEO, 2013), 566-567.

Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap mereka yang pulang dari berhaji ke Makkah dan sekitarnya tidaklah berdasar – berhaji bagian dari ibadah murni. Sebagai hasil, pemerintah kolonial membolehkan muslim Indonesia untuk melakukan ibadah haji,¹⁹ walau mereka tetap diawasi oleh pemerintah.

Kontrol pemerintah kolonial dilakukan secara tersembunyi untuk mendeteksi pengaruh ideologi Pan-Islamisme terhadap jama'ah haji dari Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah menugaskan Snouck Hurgronje pergi ke Jeddah pada tahun 1884. Ini satu bukti keseriusan pemerintah akan pengawasan terhadap pengaruh ideologi transnasionalisme tersebut.²⁰ Dengan adanya kebijakan kedua ini, para calon jama'ah haji tidak dikaitkan lagi dengan isu-isu Pan-Islamisme. Memang, yang dicurigai terdampak Pan-Islamisme adalah orang-orang Islam Indonesia yang sudah lama tinggal di Saudi Arabia (*muqim*).²¹ Ini berakibat pada kecurigaan pemerintah terhadap kepulangan para *muqim* ke Indonesia.

¹⁹ J. Vredenburg, *The Haddj: Some of Its Features and Functions in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 118, No. 1, 1962, 97-98

²⁰ "Pendahuluan", dalam Henri Chamber-Loir, *Naik Haji di Masa Silam 1482-1890*, Cet. I, (Jakarta-Paris: KPG-EFEO,2013), 58-59.

²¹ J. Vredenburg, *The Haddj: Some of Its Features and Functions in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 118, No. 1, 1962, 97-98

Belanda dan Inggris

Di Belanda, pemerintah sejak tahun 1983 membolehkan muslim Belanda dan muslim yang tinggal di Belanda dari etnis manapun untuk melakukan ibadah haji.²² Kebijakan ini sebenarnya mirip, kalau tidak serupa persis, dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia semenjak mendapatkan masukan dari Snouck Hurgronje²³ – walau mengalami penyesuaian seiring dengan kebutuhan politik. Mereka pada umumnya tidak menemukan kendala finansial walau banyak yang bergaji standar buruh, 1.000 – 1.700-an Euro bagi mereka yang berusia lebih dari delapan belas tahun.²⁴ Dari segi harga, sebelum tahun 2022²⁵ mereka hanya membayar, umpamanya tahun 2018, 4.200-7.000 Euro²⁶ - harga yang sangat terjangkau karena mereka hanya butuh menyimpan dua ratus hingga tiga ratus Euro perbulan dan dalam dua hingga tiga tahun bisa membayarnya. Secara administratif mereka pun tidak mengalami halangan yang berarti. Apalagi mereka menjadi anggota organisasi Islam yang memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji. Mereka

²² Lihat "Minderhedenbeleid 16 102", Tweede Kamer der Staten-Generaal, September 15, 1983, 110.

²³ Suminto, *Politik Islam*, 12.

²⁴ "Amount of the Minimum Wage", <https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-minimum-wage>, diakses 31 Juli 2022. Lihat juga Forum, *The Position of Muslim in the Netherlands: Facts and Figures* (Utrecht: Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 2008), 25

²⁵ "Hadj Seizoun zonder Reisbureaus", <https://hadjinfo.nl/hadj-seizoen-2022-zonder-reisbureaus/>, diakses 31 Juli 2022.

²⁶ "Pelgrimstocht Hadj Begint, ook 4000 Nederlanders in Mekka", <https://nos.nl/artikel/2246708-pelgrimstocht-hadj-begint-ook-4000-nederlanders-in-mekka>, diakses 31 Juli 2022.

hanya perlu mendaftar dan membayar kepada kordinator-nya (dari organisasinya) serta mengikuti manasik haji yang diselenggarakannya sambil menunggu mendapatkan visa haji – syarat terakhir ini yang memang tidak mudah didapatlkan karena sangat tergantung kepada kualitas pihak travel yang mengusahakannya. Tiket dan tempat tinggal (hotel) juga sudah difasilitasi oleh koordinatornya yang biasanya bekerjasama dengan pihak travel tersebut.

Sebagai contoh, orang-orang Islam Indonesia atau keturunan Indonesia yang tinggal di Amsterdam dapat berkomunikasi dengan organisasi Islam Indonesia at-Taqwa yang telah bekerjasama dengan Haremeyn Vakfi. Yayasan Turki ini sudah bekerjasama dengan at-Taqwa semenjak tahun 2010 untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ibadah haji dari jama'ah at-Taqwa.

Ada beberapa argumentasi atas pemilihan kerjasamanya dengan Vakfi. Penawaran harga ONH murah menjadi alasan utama. Saat itu masih sekitar tiga ribu hingga empat ribu Euro.²⁷ Selanjutnya, kebonafidan yayasan dan kualitas kinerja dari *partner* juga penting untuk dipertimbangkan. Ini akan terkait dengan persiapan dan kenyamanan tinggal di lokasi dan dalam pelaksanaan ibadah haji.²⁸ Bagaimana kesigapan *partner* dalam mempersiapkan ibadah wuqf di

²⁷ Said Badjuber (A Hajj Organizer of at-Taqwa), Telephon Interview, 15 December 2011.

²⁸ Ibid.

Arafah sehingga jama'ah haji merasa nyaman dan tenang ketika melaksanakan puncak ritual haji adalah satu contoh yang bergantung pada kualitas dan kebonafidan *partner*.

Selain fasilitas yang disebutkan di atas, pembekalan-pembekalan manasik haji disediakan oleh at-Taqwa. Bagi yang mendaftar haji melalui organisasi tersebut, ibadah haji yang akan dilaksanakannya (biasanya kurang lebih selama dua puluh hari seperti peserta ONH Plus di Indonesia) dibekali dengan berbagai informasi cara-cara beribadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Contoh, tata cara berpakaian ihram, bersa'i, bertawaf, dan berwuquf di Arafah diajarkan ke para peserta di masjid at-Taqwa oleh imam dan pembimbing haji yang sudah berpengalaman. Ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi Islam yang aktif dan akomodatif terhadap kebutuhan jama'ahnya cukup membantu keinginan anggota-anggotanya yang menginginkan ibadah haji.

Selain at-Taqwa, mereka juga dapat menghubungi YMAE cabang Amsterdam lainnya yaitu YMAE al-Ikhlash. Bila di at-Taqwa keturunan Arab dari Indonesia mudah kita temukan di samping para muallaf dari Belanda. Di YMAE al-Ikhlash, keturunan Suriname Jawa lebih mudah kita dapatkan. Organisasi ini pun memfasilitasi yang ingin menunaikan ibadah haji. Al-Ikhlash ini pernah bekerjasama

dengan pihak *Travel Agency* el-Mousa (Mesir) untuk bisa memfasilitasi kegiatan ibadah itu.²⁹ Bahkan mereka yang bergabung dengan organisasi ini mendapatkan bantuan finansial walau ala kadarnya.³⁰

Sementara itu, muslim Indonesia atau keturunan Indonesia yang tinggal di kota-kota besar lainnya seperti di Den Haag, Rotterdam, Delft, dan Utrecht dapat berkomunikasi dengan pihak pemerintah dan organisasi Islam terdekat. Mereka dapat menghubungi pihak konsuler urusan keagamaan KBRI di Den Haag. Selain itu, mereka juga dapat menghubungi, sebagai contoh, YMAE cabang Den Haag. Yang tinggal di Rotterdam dan sekitarnya dapat berkomunikasi dengan YMAE Cabang Rotterdam. Mereka juga dapat menghubungi Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP-PKS), yang sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan intelektual.³¹ Juga, yang tinggal di Kota Utrecht dapat menjalin komunikasi dengan Stichtig Generasi Baru (SGB), yang sedang aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dakwah, edukasi, dan kebudayaan.³²

²⁹ Budi Santoso (mantan ketua YMAE al-Ikhlash), Wawancara, Jombang, 13 April 2010.

³⁰ "PPME Al-Ikhlash Amsterdam", <https://www.ppme-amsterdam.nl/copy-of-diensten>, diakses 2 Agustus 2022.

³¹ Deden S. Permana (ketua PIP-PKS Belanda), Wawancara, Schiedam, 11 November 2008.

³² "Transforming and Sharing Islamic Values for Better and Meaningful Life", <https://generasibaru.nl/>, diakses 3 Agustus 2022.

Berbeda dengan kondisi normal tahun-tahun sebelumnya, berhaji dari Eropa pada tahun 2022 tampaknya sangat berbeda. Tahun ini bukanlah tahun yang nyaman bagi muslim, sebagai contoh, yang ingin berhaji dari Inggris. Halangan tidak hanya bersifat administratif, namun juga bersifat finansial. Sebagai contoh dari Inggris, mereka tidak hanya mendapatkan harga yang tidak jelas dari 10.000 Euro hingga 30.000-40.000 Euro.³³ Padahal, harga-harga itu sudah ditawarkan dalam bentuk paket (*silver-gold-platinum*, dari 5.000-an hingga 8.000-an Pound), namun harga-harga itu tidak bisa dijadikan pegangan, karena harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari *miracle* sistem lotere dari website resmi pemerintah Saudi Arabia. Dari lotre yang tidak menawarkan kepastian dapatnya inilah harus mempersiapkan diri berangkat ibadah haji.³⁴

Untuk mendapatkan visa haji, *Travel Agency* tidak lagi memegang otoritas yang menentukan. Bagi yang ingin berhaji, dia harus mendaftarkan ke *website* haji resmi pemerintah Saudi Arabia, *Motawif*.³⁵ Namun, walau sudah mendaftar ke *website*-nya, kepastian mendapatkan visa haji

³³ "British Muslim Travel Agencies in Uproar over Saudi Hajj Changes", <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/26/british-muslim-travel-agencies-in-uproar-over-saudi-hajj-changes>, diakses 29 Juli 2022.

³⁴ Hasan Ekici, "New Hajj System and Rules - New Hajj Portal 'Motawif'", <https://thepilgrim.co/new-hajj-system-portal-called-motawif/#:~:text=Hajj%202022%20from%20the%20UK&text=The%20estimated%20cost%20of%20the,the%20Platinum%20costs%20%2%A38%2C096.84>, diakses 29 Juli 2022.

³⁵ Areeb Ullah, "Saudi Arabia: Western Pilgrims No Longer to Book Hajj via Travel Agencies", <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-hajj-western-pilgrims-not-able-book-travel-agencies>, diakses 29 Juli 2022.

belum terjamin. Ini karena pihak *Travel Agency* tidak bisa bertransaksi dengan pihak-pihak yang biasa menjamin mendapatkan visa haji – semua berdasar sistem lotere dari *website* tersebut.³⁶ Kondisi ini telah membuat risau orang-orang Islam yang akan berhaji dari Eropa terutama secara mental, padahal mereka belum berangkat.

Akibatnya, sebagian calon jama'ah haji dari Inggris lebih memilih tidak berhaji pada tahun ini. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Mereka berpikir dengan tarif haji yang tidak jelas secara finansial, mereka tidak merasa aman karena mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat tidak nyaman dalam beribadah haji nanti. Sebagian mereka menyatakan: "sebelum berangkat saja tidak jelas apalagi kalau sudah sampai di sana."³⁷

Tampaknya, kekacauan di atas bermula dari sistem *random drawing* untuk visa haji.³⁸ Setelah pendaftar haji mendaftar ke laman *motawif*, lotere dimulai. Tidak ada yang dapat mengintervensi hasil lotere ini, karena dilakukan pihak perusahaan yang ditunjuk pemerintah Saudi Arabia

³⁶ "British Muslim Travel Agencies in Uproar over Saudi Hajj Changes", <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/26/british-muslim-travel-agencies-in-uproar-over-saudi-hajj-changes>, diakses 29 Juli 2022.

³⁷ Rayhan Uddin, "Hajj Lottery for Western Pilgrims Descend into Farce", <https://www.middleeasteye.net/news/hajj-lottery-western-pilgrims-descends-farce>, diakses 31 Juli 2022.

³⁸ Rayhan Uddin, "Hajj: UK Pilgrims Turned Away from Airports as Lottery Chaos Continues", <https://www.middleeasteye.net/news/hajj-pilgrims-turned-away-airports-lottery-chaos-continues>, diakses 31 Juli 2022.

(sebuah perusahaan dari India). Karena dilakukan secara acak (*random*), maka hasilnya tidak bisa dipastikan siapa yang akan beruntung mendapatkan visa haji. Ketidakpastian ini sebagai pangkal kekacauan berikutnya. Tidak ada kepastian pendaftar pertama akan mendapatkan visa haji. Padahal, mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali bergantung pada hasil lotere tersebut. Sementara itu, mereka digantung oleh laman tersebut karena keputusannya (melalui email) diberikan menjelang hari-hari keberangkatan. Ini berakibat walau para calon jama'ah haji sudah menuju ke bandara, mereka belum pasti berangkat ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji. Walhasil, mereka harus kembali ke rumah walau sudah siap untuk berhaji.

Buku *Haji dan Siasat Perlawanan terhadap Kolonial di Indonesia, 1900-1945* yang ada di tangan pembaca ini adalah referensi yang dapat mengisi gap-gap penelitian tentang haji di Indonesia masa kolonial. Seperti disebutkan di atas, pelaksanaan ibadah haji masa kolonial lebih menantang bagi para calon jama'ah haji karena kebijakan pemerintah kolonial yang mendua, terutama saat pembolehan ibadah haji tetapi pemerintah masih melakukan berbagai tindakan pengawasan terhadap mereka yang sedang berhaji di lokasi ibadah haji. Kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan, terutama pada dampak berhaji bagi

masyarakat muslim Indonesia tidak hanya saat ini, namun juga saat mendatang. Ini penting untuk peningkatan, terutama, kualitas kebijakan dan ibadah haji bagi jama'ah haji. Semakin meningkat kualitas kebijakan pemerintah dan ibadah mereka, semakin meningkat dampaknya bagi kualitas intelektual dan jejaring internasional sumber daya manusia Indonesia.

Kehadiran buku itu pun dapat menjadi dasar pemikiran bagaimana seharusnya penyelenggaraan haji diselenggarakan. Sejarah penyelenggaraan haji dapat memberikan arahan bagi pengambil kebijakan dalam kondisi normal dan abnormal. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan bangsa Indonesia sehingga *quota* haji yang diberikan pemerintah Saudi Arabia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai contoh, tahun ini (2022) Pemerintah Saudi Arabia memberikan *quota* haji tambahan sepuluh ribu orang kepada pemerintah Indonesia. Namun tambahan *quota* ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita dengan alasan utama ketidakcukupan waktu yang tersedia (lima hingga sepuluh hari) untuk mengurus *quota* tambahan tersebut. Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat, penerbitan Keputusan Presiden, penerbitan Keputusan Menteri Agama, verifikasi data jama'ah, pelunasan ONH, pelibatan rekanan untuk pelayanan

penerbangan dan di lokasi ibadah haji, dan penyesuaian kontrak-kontrak merupakan hal-hal yang harus dilakukan. Itu semua tidak mungkin diselesaikan dalam beberapa hari.³⁹ Keputusan ini mungkin terbaik bila melihat peristiwa-peristiwa yang menimpa calon jama'ah haji, sebagai contoh, di Inggris yang tidak menentu karena tidak ada kepastian yang dapat dijadikan sandaran untuk melakukan berbagai persiapan keberangkatan calon jama'ah haji.

Daftar Isi

Daftar Isi tentang Haji dan Politik 1

Daftar Isi tentang Pengawasan Belanda 1

Masa Umat Islam dan Politik Kolonial

di Indonesia 13

di Belanda 15

di Eropa 18

Konflik Keagamaan 21

Politik Islam di Belanda 23

di Eropa 24

Pengaruh Haji terhadap Masyarakat Indonesia 27

di Belanda 27

³⁹ Dani Jumadil, "Ini Alasan Kemenag Tak Ambil Jatah Tambahan 10.000 Kuota Haji 2022", <https://nasional.sindonews.com/read/812135/15/ini-alasan-kemenag-tak-ambil-jatah-tambahan-10000-kuota-haji-2022-1656482800>, diakses 31 Juli 2022.

Daftar Isi

Pengantar -----	v
Sekapur Sirih: Berhaji dari Indonesia dan Eropa -----	ix
— Oleh: Dr. Sujadi, M.A	
Gambaran Umum tentang Haji dan Politik-----	1
—Haji Indonesia dalam Pengawasan Belanda -----	4
Kondisi Umat Islam dan Politik Kolonial	
di Indonesia-----	13
—Kondisi Sosial-----	15
—Kondisi Ekonomi -----	18
—Kondisi Keagamaan-----	23
—Politik Islam Belanda -----	26
—Politik Islam Jepang-----	34
Pengaruh Haji terhadap Masyarakat Indonesia ----	47
—Bidang Politik-----	47
—Bidang Ekonomi -----	55
—Bidang Pendidikan -----	63




Hubungan Ibadah Haji dengan Organisasi Politik Islam di Indonesia -----	69
– Kelahiran Organisasi Politik Islam di Indonesia-----	70
– Pan-Islamisme -----	71
– Penjajahan Bangsa Barat dan Kondisi Umat Islam ----	72
– Spirit Nasionalisme untuk Melawan Penjajah-----	75
– Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) -----	77
– Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI)-----	88
Peran Haji Bagi Bangsa Indonesia -----	101
Daftar Pustaka -----	106
Tentang Penulis -----	110

Buku *Haji dan Siasat Perlawanan terhadap Kolonial di Indonesia, 1900-1945* yang ada di tangan pembaca ini merupakan referensi yang dapat mengisi gap-gap penelitian tentang haji di Indonesia masa kolonial. Pelaksanaan ibadah haji masa kolonial lebih menantang bagi para calon jama'ah haji, karena kebijakan pemerintah kolonial yang mendua, terutama saat pembolehan ibadah haji, tetapi pemerintah masih melakukan berbagai tindakan pengawasan terhadap mereka yang sedang berhaji di lokasi ibadah haji.

Hadirnya buku ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan, terutama pada dampak berhaji bagi masyarakat muslim Indonesia tidak hanya saat ini, namun juga saat mendatang. Ini penting untuk peningkatan, terutama, kualitas kebijakan dan ibadah haji jama'ah haji. Semakin meningkat kualitas kebijakan pemerintah dan ibadah mereka, semakin meningkat dampaknya bagi kualitas intelektual dan jejaring internasional sumber daya manusia Indonesia.

—*Dr. Sujadi, M.A, staf pengajar Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*



  
@sulurpustaka
www.sulur.co.id

ISBN: 978-623-5294-16-2



SEJARAH